

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUASIN

Hatta Azzuhri¹, Erik Darmawan², Reni Apriani³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan^{1,2,3}

Email : hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari penurunan jumlah titik api (Hotspot) pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan ini terjadi akibat kerja sama yang baik antara pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Manggala Agni Daops Banyuasin, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Banyuasin. Selain itu, berdirinya beberapa desa yang peduli terhadap kebakaran di daerah Kabupaten Banyuasin serta respons masyarakat yang tinggi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hambatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama terkait dengan akses komunikasi dan transportasi. Sedangkan faktor yang mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah ketersediaan peralatan serta sumber daya manusia yang siap membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)*

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of forest and land fire prevention policies in Banyuasin Regency. This research aims to examine the implementation of forest and land fire prevention policies in the Banyuasin Regency area. This research applies a qualitative approach to analyze the implementation of forest and land fire prevention policies in Banyuasin Regency. The results of this research, the success of the implementation of forest and land fire prevention policies in Banyuasin Regency can be seen from the decrease in the number of hotspots in 2016 when compared to 2015. This decrease occurred due to good cooperation between the Regency government, the South Sumatra Provincial Government, Manggala Agni Daops Banyuasin, the community, and other related parties in efforts to prevent forest and land fires in the Banyuasin Regency area. In addition, the establishment of several villages that care about fires in the Banyuasin Regency area and the high community response in efforts to prevent forest and land fires.

Obstacles in preventing forest and land fires are mainly related to communication and transportation access. Meanwhile, factors that support the prevention of forest and land fires are the availability of equipment and human resources ready to help prevent forest and land fires.

Keywords: *Implementation, Forest and Land Fire*

PENDAHULUAN

Adanya perubahan yang terjadi akibat reformasi memungkinkan Indonesia untuk bertransformasi dalam paradigma pembangunan nasional, menggeser dari fokus pertumbuhan menuju upaya pemerataan pembangunan yang lebih adil dan seimbang.

Kebijakan nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kebakaran yang berlaku di seluruh daerah.

Karena itu, kebijakan desentralisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, meskipun tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdampak pada protes dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang terdampak kabut asap sehingga Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pengendalian kebakaran secara nasional untuk menjaga kelancaran serta stabilitas pemerintahan

dan memastikan kualitas udara atau oksigen yang bersih, mengingat Indonesia paru-paru dunia.

Di Daerah Kabupaten Banyuasin, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memiliki tanggungjawab dalam menangani masalah kebakaran di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin belum sepenuhnya teratasi secara efektif, karena masih ada titik api (*hotspot*) yang terlihat serta berbagai hambatan yang menghalangi upaya pencegahan kebakaran di daerah ini.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini masih menunjukkan efektivitas yang rendah baik oleh pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi oleh Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, serta oleh Lembaga Pemerintah Pusat dengan kebijakan dekonsentrasi seperti Manggala Agni di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di

provinsi Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Banyuasin.

KAJIAN PUSTAKA

1. KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam sebuah peraturan tentu mengacu pada sebuah kebijakan. Kebijakan (Keban,2008) merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik.

Charles O. Jones (kadir,2020) istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, *proposal*, dan *grand design*.

Jayantya (Nur, 2019) mengatakan, kebijakan adalah taktik dan strategi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mencakup tiga unsur. yaitu, (1) identifikasi tujuan yang ingin dicapai, (2) taktik atau strategi berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan (3) berbagai masukan yang memungkinkan terlaksananya kebijakan publik secara aktual menawarkan taktik atau strategi tujuan kebijakan

Kebijakan (Pasolong,2007) merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam

terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong,2007).

Menurut PBB, Kebijakan (Azzuhri,2024) adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Thomas R.Dye (Santosa,2009) merumuskan kebijakan publik sebagai : pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.

Sedangkan definisi kebijakan, menurut peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 (Nugroho,2011:740), Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

Laswell dan Kaplan (Waluyo,2007) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goal, value and practice*).

Di samping itu, Anderson (Waluyo,2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (*a purposeive cource of action followed by an actor on set at actors in dealing with a problem or matter of concern*).

Dari definisi di atas, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan program yang diproyeksikan yang pemanfaatannya digunakan memecahkan suatu masalah dalam rangka mencapai tertentu.

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Grindle (Solichin,2001) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Jones (Iskandar,2012), implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu (1) beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislater, hakim, dan lain-lain, (2) birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program yang dijalankan, dalam arti apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Model Grindle (1980) pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation and Administration*

Process. Menurut Grindle (2016), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor,yaitu :
 - a. Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Grindle (Agustino, 2016) keberhasilan suatu kebijakan amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari atas *Content of Policy* (Isi dari Kebijakan) dan *Context of Policy* (lingkungan dari implementasi kebijakan),yaitu :

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

2. *Type of Benefit* (tipe manfaat).
 3. *Extent of Change*
 4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan).
 5. *Program Implementer* (pelaksana program).
 6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)
- B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah :
1. *Power, Interest, Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor terlibat).
 2. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).
 3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat)

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

METODE

Metode penelitian (Sugiyono,2012) pada dasarnya merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian Kualitatif menurut Satori dan Komariah (2009) adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa, berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Lokasi Penelitian di 3(tiga) Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Tanjung Lago, dan Kecamatan Banyuasin III.

Teknik pengumpulan data (Sugiyono,2012) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen :

1. Dokumentasi.
2. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*).
3. Observasi.
4. Studi Kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyuasin

Pada penelitian ini menitikberatkan implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin melibatkan beberapa aspek terkait dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya diuraikan seperti satu per satu :

1.Tujuan Kebijakan

Dalam model implementasi Kebijakan Grindle, tujuan kebijakan merupakan acuan dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin mempunyai tujuan kebijakan, yaitu tujuannya meminimalkan titik api (*Hotspot*) yang ada di Wilayah Kabupaten Banyuasin.

Tujuan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin berpedoman pada UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P32/Men.LHK/Setjen/Kum/1/3/2016 sebagai landasan dalam kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempunyai peraturan daerah,yaitu Perbup No.116 Tahun 2015 tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin.

Tujuan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan

Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu melibatkan atau memberdaya masyarakat setempat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun Manggala Agni Daops Banyuasin serta dibantu oleh TNI/Polri dan pihak terkait dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banyuasin.

2.Program Instansi Terkait Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Program instansi terkait kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Banyuasin kadang sering disebut istilah Desa Peduli Api (DPA) meskipun nama penyebutannya berbeda seperti KTPA (Kelompok Tani Peduli Api), RKDT (Regu Kelompok Desa Terlatih) dan Masyarakat Peduli Api(MPA). Selanjutnya, berdasarkan data dokumentasi BPBD-Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, Desa Peduli Api yang terbentuk sebanyak 79 Desa di mana setiap kecamatan memiliki desa peduli api.

3.Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan,yaitu kepentingan nasional dan daerah di mana berbagai kepentingan mempengaruhi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin.

Kepentingan dari berbagai pihak menginginkan kelancaran aktivitas atau kegiatan yang ada di Wilayah Kabupaten Banyuasin tanpa adanya hambatan dari kabut asap pada musim kemarau sehingga berbagai pihak melakukan kegiatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat atau petani dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin untuk meminimalkan angka titik api (*hotspot*) di wilayah Kabupaten Banyuasin serta tidak mengganggu aktivitas pemerintahan atau kegiatan di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

4. Tipe Manfaat yang akan dihasilkan

Manfaat pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu adalah udara bersih, membuat masyarakat lebih peka terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan agar kelancaran aktivitas di wilayah Kabupaten Banyuasin tersebut lancar tanpa adanya kabut asap selama musim kemarau sehingga aktivitas di wilayah Kabupaten Banyuasin berjalan dengan lancar. Manfaat ini juga tidak terlepas dari keterlibatan para implementor pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Manggala Agni Daops Banyuasin yang dibantu oleh TNI / Polri dalam sosialisasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

5. Derajat Perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan terlihat jelas keberhasilan implementasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu tidak terlepas dari semua elemen yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik BPBD-Kesbangpol Kabupaten, Manggala Agni Daops Banyuasin, satgas desa, TNI/Polri dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya saling koordinasi dan kerjasama dalam meminimalkan titik api (*Hotspot*) yang ada di Kabupaten Banyuasin sehingga derajat perubahan yang diinginkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan bisa terlihat seperti menurun angka titik api (*hotspot*) yang ada di Kabupaten Banyuasin di mana peran serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Manggala Agni Daops Banyuasin yang dibantu TNI / Polri dalam patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat/pemilik lahan baik perusahaan/ masyarakat sehingga angka titik api bisa ditekan atau diminimalkan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banyuasin.

6. Letak Pengambil Keputusan

Letak pengambil keputusan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Banyuasin itu, yaitu kapasitas organisasi pelaksana program pencegahan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P32/Men.LHK/Setjen/Kum/1/3/2016 di mana Bupati selaku pengambil keputusan dan tanggung jawab atas wilayah Kabupaten yang dipimpinnya.

7. Pelaksana Program

Pelaksana program pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Manggala Agni Daops Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pertanian dan BPBD-Kesbangpol Kabupaten Banyuasin yang memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin selain Manggala Agni Daops Banyuasin yang merupakan lembaga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di provinsi Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Banyuasin. Dalam melaksanakan program tersebut. Pelaksana program melakukan tahap pembinaan, pengawasan dan tahap koordinasi dan evaluasi.

8. Sumber Daya yang Dilibatkan/Digunakan

Sumber daya yang dilibatkan/digunakan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sini oleh Manggala Agni, BPBD-Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, dan Dinas Pertanian adalah kelompok peduli api atau masyarakat peduli yang tujuannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Banyuasin yang tentunya dilatih dan dibina serta diberikan peralatan pemadam kebakaran seperti pompa, pemadam api ringan, baju, dan lain-lain. Selain itu, sumber daya yang dilibatkan adalah TNI/Polri untuk melakukan tindakan penegakkan hukum apabila pemilik lahan atau hutan membakar lahannya bila membuka lahan dengan cara membakar karena melanggar Undang-undang atau peraturan. Tujuan mengerahkan sumber daya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan salah satunya untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dibina dan dilatih bagaimana cara untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang bertujuan untuk meminimalkan angka titik api dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin.

9. Strategi Aktor yang Terlibat: **Strategi Pelaksanaan Program**

Strategi para aktor yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah cukup baik di mana Peran Bupati beserta jajaran yang bekerja sama dengan pihak Manggala Agni Daops Banyuasin serta dibantu TNI/Polri dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banyuasin dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten,yaitu meminimalkan angka titik api (Hotspot) di wilayah

Kabupaten Banyuasin dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin di mana peran serta Bupati selaku penanggung jawab karhutla di Kabupaten Banyuasin itu memberikan wewenang atau tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada BPBD-Kesbangpol Banyuasin dan Dinas Pertanian untuk melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat atau pemilik untuk mematuhi peraturan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

10. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik lembaga di sini di mana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin mempunyai peranan masing-masing. BPBD-Kesbangpol dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin memiliki peranan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan mewakili Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke desa-desa dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di samping memiliki tugas lain di luar kebakaran hutan dan lahan. Karakteristik lembaga Manggala Agni Daops Banyuasin, tugasnya memang terfokus pada kebakaran hutan dan lahan yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Banyuasin dalam mencegah dan

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasionalnya yang tidak hanya Kabupaten Banyuasin, tetapi juga di Kabupaten Ogan Illir dan Kota Palembang.

11. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin di sini, yaitu kepatuhan masyarakat dan perusahaan pada peraturan dan kesiagaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah cukup baik dan kesiagaan terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan cukup baik dan masyarakat tidak lupa berkoordinasi dengan tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti Manggala Agni Daops Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui BPBD- Kesbangpol dan Dinas Pertanian.

12. Outcomes / Hasil Kebijakan

Outcomes / Hasil Kebijakan, yaitu perubahan perilaku masyarakat dan kelancaran aktivitas kehidupan sudah cukup baik. Masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran dan tentunya terciptanya kelancaran aktivitas kehidupan masyarakat sehingga masyarakat pun tidak terganggu dalam aktivitasnya. Dampak pada perusahaan perkebunan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu perusahaan perkebunan lebih peka dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

13. Pengukuran Keberhasilan

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 dan bertambahnya jumlah Desa Peduli Api seperti yang ada pada lampiran 79 Desa Peduli Api. Respon masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan baik dan masyarakat cukup patuh dalam mencegah apa yang dijelaskan oleh tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun Manggala Agni Daops Banyuasin.

14. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dan Pendukung dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyuasin

Faktor kendalanya, yaitu komunikasi dan transportasi dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di mana akses tersebut yang merupakan akses yang menghambat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin.

Faktor pendukungnya, yaitu peralatan, sarana dan prasarana dan SDM (Sumber daya manusia) yang mendukung di mana faktor ini mumpuni dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin baik dari pihak pemerintah Kabupaten

Banyuasin, Manggala Agni Daops Banyuasin, masyarakat sekitar dan perusahaan yang bergerak di bidang HTI / perkebunan.

Masalah dalam implementasi kebijakan ini, yaitu kendala baik dari akses komunikasi dan transportasi di samping dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Belum begitu padu terutama masih bergerak sendiri-sendiri dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi.

KESIMPULAN

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin dilihat menurun titik api (Hotspot) pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Hal ini dikarenakan oleh koordinasi yang sinergis pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Manggala Agni Daops Banyuasin, masyarakat, dan *stakeholder* yang terkait dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, terbentuknya beberapa desa peduli api di wilayah Kabupaten Banyuasin serta daya tanggap/pedulinya masyarakat dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tujuan untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan agar tidak seperti kejadian pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.(2016).*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung : CV.Afabeta
- Azzuhri, Hatta dkk. (2024). *Kebijakan Publik*. Palembang : Noerfikri Offset
- Iskandar, Jusman.(2005).*Manajemen Publik*.Bandung: Puspaga
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. CV. Dharma Persada.
- Keban, Yeremias T.(2008). *Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Jogjakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant.(2011).*Public Policy*.Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.
- Pasolong, Harbani.(2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Santosa, Pandji. (2009). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama
- Solichin,Abdul Wahab.(1990).*Analisis Kebijakan Formulasi dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.Bandung : Alfabeta
- .*Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R & D*.Bandung : Alfabeta
- Waluyo.2007.*Manajemen Publik*.Bandung : CV. Mandar Maju.